

## BAB II

### AWAL KEDATANGAN DAN INTERVENSI VOC KE KERATON

#### CIREBON TAHUN 1776-1786

##### 2.1 Kesultanan Cirebon sebelum Kedatangan VOC

###### 2.1.1 Pembentukan Cirebon

Dalam Kitab Purwaka Caruban Nagari, Agama Islam masuk ke Cirebon diperkirakan pada abad ke-15, yang dibuktikan dengan adanya penduduk dusun kecil di bukit Amparan Jati. Amparan Jati letaknya tidak jauh dari pelabuhan Muara Jati disebelah timur. Islamisasi di Cirebon dilakukan karena adanya persahabatan dengan bangsa lain melalui perdagangan. Bangsa-bangsa pertama yang melakukan perdagangan di Cirebon adalah Cina, Arab, India dan Persia. Pada masa itu Cirebon masih dibawah kerajaan Pajajaran<sup>25</sup> yang masih melarang pedagang muslim untuk masuk dan menetap di wilayah kekuasaanya.<sup>26</sup>

Letak geografis Cirebon abad ke-15 dengan Kota Cirebon sekarang tidak jauh beda. Terletak berada di teluk yang terlindung dari gangguan gelombang laut yang besar. Pelabuhan Cirebon tidak terlalu jauh dari daerah Amparan Jati sebagai tempat tinggal para penduduk pribumi dan pendatang. Namun, pelabuhan besar Cirebon terbilang cukup jauh dari pelabuhan besar yang ada di pulau Jawa seperti Banten, Sunda Kelapa, Japara, Tuban dan Surabaya. Peran Pelabuhan Cirebon

---

<sup>25</sup> Kerajaan Pajajaran adalah kerajaan yang bercorak Hindu yang dipimpin oleh Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi. Kerajaan ini menguasai wilayah seluruh tatar Sunda termasuk Cirebon.

<sup>26</sup> Adeng, Kuswiah, W., Wiryono, H., & Erwantoro, H. (1998). *Kota Dagang Cirebon Sebagai Bandar Jalur Sutra*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesiwa. Hlm. 20-23.

yang nantinya di abad ke-18 dan abad ke-19 banyak pedagang lokal dan internasional yang datang dan bermukim.<sup>27</sup>

Pada tahun 1418 Ki Gedeng Jumajanjati (kuwu Amparan Jati), memiliki keterikatan dengan seorang ulama dan saudagar Arab yakni Syekh Hasanuddin bin Yusuf Sidik. Setelah lama singgah di Amparan Jati<sup>28</sup> Syekh Hasanuddin pergi kesebelah barat dan mendirikan pesantren, daerah itu sekarang dikenal dengan nama Karawang. Syekh Hasanuddin memiliki murid yakni Nyai Subang Larang yang menikah dengan Prabu Siliwangi. Memiliki tiga putra diantaranya Pangeran Walangsungang, Nyimas Rara Santang, dan Raja Sangara.

Pada tahun 1420 Cirebon kemudian kedatangan ulama dan saudagar Bagdad bernama Syekh Datuk Kahfi atau Syekh Nurjati, dengan membawa pengikutnya sebanyak 20 pria dan 2 wanita yang merupakan anak dan istrinya. Syekh Nurjati melakukan persahabatan dengan Ki Gedeng Jumajanjati. Ki Gedeng Jumajanjati sangat menghormati mereka dan memberi tempat kediaman kepada Sekh Nurjati. Syekh Nurjati mendirikan pesantren di Amparan Jati. Tidak lama dari berdirinya pesantren ini kedatangan Raden Walangsungang beserta istri dan adiknya Rara Santang untuk berguru kepada Syekh Nurjati.<sup>29</sup>

Awal dari berdirinya pesantren di Amparan Jati menjadi perkembangan Islam di Cirebon menjadi sangat pesat. Kedatangan dari Raden Walangsungang menjadi cikal bakal berdirinya Cirebon, dengan dibukanya perkampungan di

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> Amparan Jati adalah sebuah pedukuhan kecil yang dipimpin oleh Ki Gedeng Jumajati. Tempat yang dikenal sebagai titik awal penyebaran Islam di Cirebon, karena banyaknya para saudagar Islam menetap di daerah ini.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 22.

pesisir Lemahwungkuk<sup>30</sup>. Pada tahun 1452 Raden Walangsungsang mendirikan pasangrahan yang diberinama Keraton Pakungwati. Keraton ini digunakan untuk tempat tinggal dan tempat penyebaran agama Islam. Dengan adanya Keraton ini memiliki arti bahwa Cirebon berdiri dari pemerintahan kecil yang bercorak Islam. Penyebaran Islam yang dilakukan oleh Raden Walangsungsang hanya dilakukan di sekitar pesisir Cirebon saja. Pada tahun 1470, Cirebon kedatangan keponakan dari Raden Walangsungsang yakni Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah adalah anak dari Nyimas Rara Santang<sup>31</sup> dengan Sultan Abdullah (Raja Mesir).<sup>32</sup>

Kepemimpinan Pangeran Walangsungsang digantikan oleh Syarif Hidayatullah pada tahun 1479. Syarif Hidayatullah menjadi salah satu walisongo di Pulau Jawa dengan nama Sunan Gunung Jati. Cirebon dibawah kekuasaan Sunan Gunung Jati membedakan dua daerah yakni Cirebon Larang (daerah pesisir) dan Cirebon Girang (daerah pedalaman). Kepemimpinan Sunan Gunung Jati berhasil membuat Kesultanan Cirebon menjadi kerajaan Islam yang memisahkan diri dari Pajajaran. Awal dalam pemisahan Cirebon berhenti memberikan upeti kepada Kerajaan Pajajaran. Pemisahan Cirebon dari Pajajaran terjadi pada 12 Safar 887 Hijriah atau 2 April 1482 Masehi, tanggal ini dijadikan sebagai hari Jadi Kabupaten Cirebon.<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup> Lemahwungkuk atau Tegal Alang-alang, adalah daerah yang ditemukan oleh Raden Walangsungsang, daerah ini menjadi cikal bakal Cirebon. Lemahwungkuk dipimpin oleh seorang kuwu yakni Ki Gedeng Danusela. Selanjutnya daerah ini dipimpin oleh Raden Walangsungsang sebagai Kuwu II. Sekarang daerah ini adalah Bangunan Keraton Kanoman Cirebon.

<sup>31</sup> Nyimas Rara Santang adalah adik kandung dari Raden Walangsungsang yang merupakan anak dari Prabu Siliwangi penguasa Pajajaran.

<sup>32</sup> Bochari, S, Kuswiah, W. (2001). *Sejarah Kerajaan Tradisional Cirebon*. Departemen Pendidikan Nasional. Hlm. 17-18.

<sup>33</sup> Atja., *op.cit.*, hlm. 36-37.

Masa kejayaan Cirebon berada di tangan Sunan Gunung Jati. Kepemimpinan Sunan Gunung Jati mengalami kemajuan dengan membuat Cirebon menjadi negara yang bahagia, damai dan tumbuh menjadi negara yang makmur. Pada masa kekuasaan Sunan Gunung Jati, daerah kekuasaan Cirebon menguasai tatar Sunda pedalaman yakni Galuh, Sumedang Larang, dan Subang. Kemajuan yang dipegang oleh Sunan Gunung Jati yakni dalam bidang agama, sosial-ekonomi, dan politik. Sampai akhirnya Sunan Gunung Jati wafat pada tahun 1568 M di kompleks pemakaman Gunung Sembung (Astana) Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Kepemimpinan dilanjutkan oleh Pangeran Pasarean putra Sunan Gunung Jati dan keturunannya selanjutnya.<sup>34</sup>

### **2.1.2 Cirebon Sebagai Bandar Jalur Perdagangan**

Struktur masyarakat Cirebon dibagi menjadi dua yakni Cirebon pesisir dan Cirebon pedalaman. Mata pencarian dari setiap daerah bagian juga berbeda. Cirebon pesisir biasanya menjadi nelayan, pembuat garam, gula, dan pedagang. Sedangkan Cirebon pedalaman biasanya berkebun, menjadi tukang, dan petani. Dengan demikian Cirebon tidak hanya disebut sebagai negara maritim, namun dapat disebut sebagai kerajaan yang bersifat agraris.

Cirebon tidak hanya dikenal dari hasil laut saja, namun juga dari hasil bercocok tanam yakni seperti padi, kopi, tembakau, dan cengkeh. Biasanya orang-orang pesisir mengolah hasil tangkapan dari laut menjadi terasi yang terbuat dari udang rebon<sup>35</sup>. Masyarakat Cirebon adalah tulang punggung bagi kehidupan

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 34.

<sup>35</sup> Udang rebon adalah udang yang berukuran kecil, biasanya penangkapan udang rebon ini menggunakan saringan yang berukuran besar dengan lubang yang kecil. Udang rebon di olah menjadi terasi khas Cirebon.

ekonomi yang ada di Cirebon. Karena masyarakat yang membayar upeti kepada keraton adalah dari hasil dagangnya, dan sultan hanya sebagai perantara masyarakat kepada Belanda. Sehingga rakyat ikut adil dalam kemakmuran negaranya.<sup>36</sup>

Sejarah Cirebon tercatat menjadi sebuah pelabuhan sudah sejak zaman Hindu-Budha, dengan negara kesatuan Pajajaran. Pelabuhan terkenalnya adalah Muara Jati, tempat persinggahan para Bangsa-bangsa lokal seperti Samudra Pasai, Palembang, Jawa Timur, Madura. Sedangkan bangsa internasional seperti Arab, Persia, Irak, India, Tiongkok, Malaka, Tumasik, dan Campa. Oleh sebab itulah pelabuhan Muara Jati ramai para saudagar luar.

Cirebon memiliki pelabuhan yang sangat baik, banyak kapal yang setiap harinya selalu datang dan singgah disana. Cirebon pula memiliki banyak hasil bumi yang dapat diperjual belikan kepada para saudagar yang datang. Pada tahun 1415 kedatangan saudagar Cina yang dipimpin oleh Laksamana Cheng Ho dan Kun Wei Ping berlabuh di Muara Jati. Cina merasa tertarik dengan Cirebon dan memberikan sebuah hadiah kepada Cirebon dengan membangun mercusuar di Pelabuhan Muara Jati. Bangunan mercusuar ini sebagai simbol persahabatan antara Cirebon dan Cina.<sup>37</sup>

Perdagangan di Cirebon sama seperti pelabuhan lainnya, namun Cirebon lebih memberikan kerja samanya kepada pihak Cina. Biasanya pihak Cina membawa barang dagang berupa kain sutera yang memiliki nilai jual sangat tinggi di dunia perdagangan internasional. Selain itu juga Cina membawa rempah-

---

<sup>36</sup> *Ibid.* Hlm 47

<sup>37</sup> Mahfudzoh, A. (2018). Hubungan Perdagangan Cirebon dan Sunda Kelapa Zbad XVI: Suatu Studi Sejarah Ekonomi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Hlm. 19.

rempah, buah-buahan dan lainnya. Kerja sama perdagangan antara Cirebon dan Cina berlangsung hingga berabad-abad lamanya. Pesatnya perkembangan pelabuhan Cirebon membuat bisa membuat jaringan keterikatan dengan bangsa internasional secara cepat, sehingga banyak bangsa-bangsa lain tertarik dengan Cirebon.

Cirebon mengalami perkembangan pelabuhannya tidak jauh dari adanya politik ekspansi dari Kerajaan Islam dibawah kepemimpinan Demak dan Sunan Gunung Jati. Kerajaan ini berhasil menguasai pelabuhan-pelabuhan dibawah kekuasaan Pajajaran. Karena adanya politik ini membuat bandar-bandar lain termasuk Cirebon menjadi dibawah kekuasaan Islam dan Demak. Karena itu pula perdagangan yang terjadi di pelabuhan Cirebon, Sunda Kelapa dan Banten menjadi sumber ekonomi dan perdagangan kerajaan Islam Demak pada tahun 1526-1527 M.<sup>38</sup> Dalam hal ini Cirebon dikenal sebagai kota pelabuhan dan bandar jalur sutra yang menghubungkan perdagangan antara pelabuhan Banten sampai pelabuhan Surabaya.

## **2.2 Awal Kedatangan dan Intervensi VOC di Cirebon**

Pelayaran orang Eropa ke Dunia mulai masif dijalankan pada tahun 1400-1600 Masehi. Kerajaan Belanda memulai pelayaran ke Nusantara tahun 1596 M dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Dalam rangka melakukan perdagangan di Nusantara, para pedagang Belanda mendirikan komunitas Serikat Perseroan Hindia Timur dengan sebutan *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC). Perseroan dagang ini di dirikan dan bertahan sampai akhir abad ke-18 (1602-1799

---

<sup>38</sup> *Ibid.* Hlm. 41.

M), dengan gubernur jendral sebagai pimpinan yang bertanggung jawab atas transaksi dalam perdagangan. Sampai akhirnya VOC berkembang dan meluas keseluruh wilayah Nusantara termasuk Pulau Jawa, tepatnya di Cirebon.<sup>39</sup>

Cirebon sendiri selain adanya kehadiran Belanda, juga menjadi tempat tinggal orang-orang asing sejak abad ke-16, yakni adanya bangsa Arab, Cina, Persia, dan India. Sejak tahun 1700-an Masehi banyak para pedagang yang mulai mendirikan permukiman di pesisir Cirebon. Adanya orang asing di Cirebon tidak menjadi penghalang untuk melakukan perdagangan dan penyebaran budaya. Tidak heran jika Cirebon mendapat nama *caruban* yang diberikan oleh Raden Walangsungsang, terbukti bahwa banyaknya Bangsa yang tinggal di Cirebon. Hubungan sosial di Cirebon juga berlangsung harmonis dengan bangsa lain walau penguasa di Cirebon pada saat itu adalah VOC. Pada saat itu kompeni VOC memberikan perintah kepada setiap orang asing melakukan perdagangan kepada Belanda juga.<sup>40</sup>

Abad ke-18 adalah masa yang sulit bagi masyarakat Cirebon dari segi sosial, politik, ekonomi bahkan budaya. Sejak kedatangan VOC di Nusantara, membuat semua wilayah melakukan perdagangan kepada VOC termasuk di Cirebon. Kedatangan VOC saat itu mempengaruhi kehidupan masyarakat Cirebon, terlebih saat VOC melakukan intervensi kepada Kesultanan Cirebon. Adanya ikut campur dalam pemerintahan VOC di Kesultanan Cirebon membuat Kesultanan tidak nampak lagi sebagai otoritas kekuasaan disana. Sultan di Cirebon, pada saat itu

---

<sup>39</sup> Deviani, F. T. (2016). Perjanjian 7 Januari 1681 Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Sosial Politik Ekonomi Di Kerajaan Cirebon (1681 M-1755 M). *Tamaddun : Jurnal Sejarah Kebudayaan Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon*. Hlm 127-128.

<sup>40</sup> Adeng, dkk., *op.cit.*, hlm39-40.

sudah tidak lagi menjadi pemimpin satu-satunya di Kesultanan terkecuali dalam hal keagamaan, kebudayaan, dan perdagangan. Inilah yang mengakibatkan posisi Sultan dalam Kesultanan menjadi melemah eksistensinya dikalangan masyarakat.<sup>41</sup>

Kebijakan monopoli perdagangan yang dilakukan oleh VOC selama di Cirebon tidak jauh berbeda dengan daerah lainnya. Sebagai berikut :

1. *Contingenten* (pajak hasil bumi), masyarakat diwajibkan kepada masyarakat yang memiliki tanah untuk menyerahkan sebagian hasil buminya sebagai pajak jual-beli kepada VOC,
2. *Verplichte Leverentie* (Monopoli dan Harga tetap), mewajibkan masyarakat daerah untuk menjual hasil kepada VOC dengan harga yang sudah ditentukan,
3. *Ekstirpasi* (Pembakaran hasil rempah), tujuannya untuk menjaga harga rempah-rempah di pasaran, namun hal ini membuat kerugian dari pihak pribumi,
4. *Hongitochten* (Pelayaran Hongi), pencegahan adanya perdagangan ilegal yang dilakukan pribumi kepada bangsa lain.

Adapun komoditi dagang Cirebon yang menjadi sasaran pada monopoli dagang oleh VOC adalah beras, garam, terasi, rempah-rempah seperti pala, pinang, dan kayu jati yang terkenal baik dan berkualitas di Cirebon.<sup>42</sup> Sedangkan komoditi dagang yang dibawa dari luar Cirebon seperti logam besi, perak, emas, sutra dan keramik halus. Dalam hal ini Cina, Arab dan Cina memiliki peran lebih

---

<sup>41</sup> Susanti, L. (2018). Pengaruh Kolonial Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Cirebon Tahun 1752-1830. *Jurnal Prodi Ilmu Sejarah*. Hlm 276.

<sup>42</sup> Arsip *Cheribonshe Aangelegenheden* (Perihal Cirebon). Arsip Cirebon K2, Kode 3/1.



di Cirebon terlebih banyaknya komoditi dagang yang mereka bawa lebih mendominasi di Cirebon.<sup>43</sup> Tak heran jika di Cirebon akhirnya memiliki satu kendaraan sultan yang khas akan percampuran budaya yakni Paksi Naga Liman<sup>44</sup>.

Selain itu VOC juga melakukan pengembangan administrasi politik di Cirebon untuk pengawasan secara langsung di daerah tersebut. Dengan melakukan komoditi ekspor di bidang perkebunan yang ada di pedalaman, pegunungan, dan pesisir Cirebon. VOC dalam melakukan administrasi menugaskan pejabat daerah untuk bisa mengawasi di lapangan. Kehidupan ekonomi juga menjadi hal khusus dari terpuruk dan melemahnya ekonomi masyarakat Cirebon. Hal ini dikarenakan tindakan dari komoditi dagang yang dilakukan oleh kompeni VOC di setiap wilayah komoditi Cirebon. Setelah perjanjian Sultan dengan VOC mendapatkan hal dalam monopoli dagang beras, lada, kayu, gula dan produk yang dikehendaki oleh VOC. Kekuasaan VOC sendiri dimulai sejak terjadinya perjanjian 7 Januari 1681 M.<sup>45</sup> Tahun tersebut menjadi awal kekuasaan VOC di Cirebon untuk melakukan perdagangan serta berjanji melindungi Cirebon dari gangguan pedagang asing Eropa lainnya.

Pemerintahan VOC sendiri hanya bertahan sampai akhir abad ke 18 berkisar tahun 1799 M kemudian digantikan oleh pemerintahan Hindia-Belanda. Terdapat 19 orang pejabat VOC yang pernah memimpin perdagangan di Cirebon dari tahun 1685-1786 M.

---

<sup>43</sup> Mahfudzoh, A., *op.cit.*, hlm. 32-33

<sup>44</sup> Kereta kencana Paksi Naga Liman adalah kereta sultan Cirebon yang menjadi koleksi dari Keraton Kanoman. Paksi Naga Liman memiliki tiga simbol negara yakni Arab, Cina, dan India. Dengan arti : Burung aruda (paksi), ular naga (naga), dan gajah (liman). Simbol-simbol tersebut menunjukkan perbedaan ketiga negara yang memiliki pengaruh besar di Cirebon.

<sup>45</sup> Deviani, *op.cit.*, hlm 127.

**Tabel 2.1 Para Pejabat VOC di Cirebon 1685-1786 M<sup>46</sup>**

<b>Tahun</b>	<b>Nama Pejabat VOC</b>
1685	De Koopman Maarten Samson
1688	De Koopman Adriaan Willemsen
1689	De Kapiten Willem de Ruiter
1694	De Koopman Cornelis Ring
1697	De Koopman Christian Krijger
1699	De Koopman Lucas Meijer
1700	De Luitenant Jacob Palm
1703	De Koopman Jacob Heirmans
1706	De Koopman Jan Coin
1707	De Koopman Cornelis Jongbloed
1761	Petrus Albetrus Van der Parra
1765	Robbert Hendrick Armenauet
1771	Event Jan van Neukurchr gen Nyuvenhilm
1775	Jeremias van Riemsdijk
1776	Mr. Koopman Arnolds Constantyn Mom
1778	Reiner de Klerk
1778	Mr. Willem van der Beeks
1780	Willem Arnold Alting
1786	De Koopman Crodfried Carel Gockunga

Pada tahun 1776 yang dipimpin oleh Mr. Koopman Arnolds Constantyn Mom dalam laporannya kepada pihak yang akan menggantikannya yakni Reiner de Klerk dan pimpinan Gubernur Mr. Joachim. Menjelaskan bagaimana situasi dan kondisi Cirebon dalam kurun waktu dua tahun ia menjadi pemimpin disana. Penjelasan yang dilakukan oleh Mr. Koopman bahwa Cirebon memiliki berbagai komoditi yang baik untuk diekspor untuk Kerajaan Belanda. Mr. Koopman menceritakan dalam catatannya ini hasil dagang yang ia dapatkan kepada

---

<sup>46</sup> Nina, H. (2000). *Sejarah Kota-kota Lama di Jawa Barat* : Bandung : Alqaprint. Hlm 42. diperkuat oleh Nurhata. (2020). Rekontruksi Sejarah Perlawanan Sultan Matangaji Melalui Naskah Babad. *Tamaddun : Jurnal Sejarah Kebudayaan Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon*. Hlm 388. Dan diperkuat kembali oleh data dari Bapak Mustaqim Asteja.

penggantinya, serta memberikan saran untuk terus melakukan kerja sama dengan pihak keraton.<sup>47</sup>

### **2.3 Peran VOC terhadap Perpecahan Kesultanan**

VOC memiliki peran dalam pemisahan Kesultanan Cirebon demi mendapatkan wilayah untuk melakukan perdagangan dengan mendirikan dan menjalankan komunitas perdagangan di Cirebon. Dengan menggunakan suatu perjanjian yang dilakukan VOC dan Kesultanan Cirebon.

#### **2.3.1 Perpecahan Tahap 1: Perjanjian 7 Januari 1681**

Pada abad ke-18 Cirebon dikuasai oleh VOC. Pada saat itu Pangeran Arya adalah kaki tangan dari VOC untuk mengawasi para Bupati di kawasan Priangan. VOC benar-benar mengawasi Cirebon sepenuhnya melalui Sultan-sultan yang berkuasa. Hingga akhir abad ke-18 tepatnya tahun 1681 M Kesultanan Cirebon mengalami perseteruan internal. Perseteruan ini terjadi saat Panembahan Girilaya memutuskan untuk tinggal di Mataram dan tidak kembali ke Cirebon. Pengganti dari Panembahan Girilaya adalah Martawijaya dan Kartawijaya. Namun, kedua pangeran juga sama-sama berada di Mataram, sehingga pembebasan kedua pangeran tersebut dilakukan oleh Sultan Ageng Tirtayasa dari Kesultanan Banten untuk membawa kedua pangeran kembali ke Cirebon. Walaupun sebenarnya kedua pangeran ini tidak diperkenankan oleh Sultan Amangkurat I untuk meninggalkan Cirebon, namun dikarenakan Sultan

---

<sup>47</sup> Arsip Memorian Jendral VOC Tahun 1778 “*Memorie van Overgave van AC Momaan Mr. Joachim Wichers*” (Berbahasakan Belanda). Arsip Nasional Republik Indonesia : Kode 37/12.

Amangkurat I ditawan sehingga kedua pangeran kembali ke Cirebon pada tahun 1678 M.<sup>48</sup>

Pada tahun 1677 Mataram mengalami ketidakberdayaan karena adanya serangan oleh Pangeran Trunojoyo dari Madura dengan sekutunya. Kekuatan dari Mataram melemah sehingga Keraton Plered mengalami kehancuran. Pada saat itu Mataram dipimpin oleh Amangkurat I yang kemudian meninggal dunia, karena menderita sakit keras dalam pelariannya dari Trunojoyo. Dalam peristiwa ini, putra mahkota dari Amangkurat I melakukan persekutuan dengan Belanda dan meminta bantuan kepada Belanda untuk bisa merebut kembali Mataram dari tangan Trunojoyo.<sup>49</sup>

Pada Tahun 1680 Panembahan Girilaya memutuskan untuk tinggal di Mataram, bersama kedua putranya. Hal ini membuat Cirebon mengalami kekosongan kekuasaan, yang membuat Sultan Ageng Tirtayasa<sup>50</sup> membawa kedua putra dari Panembahan Girilaya untuk kembali ke Cirebon. Kembalinya kedua pangeran ini membuat terjadinya perselisihan, sehingga Panembahan Girilaya yang bergelar Sultan Abdul Karim (1649-1667) membagi Cirebon yang meliputi Kuningan, Majalengka, Indramayu, sebagian Ciamis dan sebagian Subang. Kesultanan Cirebon dibagi menjadi tiga meliputi Kesultanan Kasepuhan, Kanoman, dan Panembahan Cirebon. Hal ini menjadi babak baru dari Kesultanan

---

<sup>48</sup> Atja. (1986). *Carita Purwaka Caruban Nagari*: Karya Sastra sebagai Sumber Pengetahuan Sejarah. Proyek Pengembangan Permuseuman Jawa Barat. Hlm 73.

<sup>49</sup> Nina, *op.cit.*, hlm 129.

<sup>50</sup> Sultan Ageng Tirtayasa adalah Sultan Banten yang memiliki darah keturunan Cirebon dari garis keturunan Sultan Maulana Hasanudin ke Sunan Gunung Jati, ia membantu mengembalikan pemerintahan Cirebon supaya memiliki penguasa dan menjalankan roda pemerintahan di Kesultanan Cirebon.

Cirebon, yang juga disebabkan campur tangan dari VOC. Berikut adalah daerah kekuasaan dari ketiga pangeran:<sup>51</sup>

1. Kesultanan Kasepuhan yang meliputi wilayah Kota Cirebon, Cirebon bagian Timur (Kabupaten Cirebon dan Brebes Jawa Tengah), Cirebon bagian Selatan (Kuningan-Galuh Ciamis), dipimpin oleh Pangeran Martawijaya dengan gelar Sultan Sepuh Abdul Makarimi Muhammad Syamsudin (1679-1697),
2. Kesultanan Kanoman yang meliputi wilayah sebagian Cirebon bagian Barat (Kabupaten Cirebon sekarang), Indramayu, Majalengka, sampai Subang, dipimpin Pangeran Kartawijaya dengan gelar Sultan Anom Abdul Makarimi Muhammad Badarudien (1679-1723),
3. Panembahan Cirebon (Kesultanan Kcirebonan) Pangeran Wangsakerta<sup>52</sup> dengan gelar Pangeran Abdul Kamil Muhammad Nasarudin atau Panembahan Tohpati (1679-1713). Panembahan Cirebon tidak memiliki wilayah, karena ini merupakan tempat untuk para pangeran yang ada di Kesultanan Kasepuhan dan Kanoman untuk melangsungkan *Peguron* atau Pendidikan dan sebagai Institusi penegak hukum kedua Keraton. Panembahan Cirebon tidak berlangsung lama, hanya sampai tahun 1773.

Awal dari perselisihan ini dimulai oleh Pangeran Martawijaya atau Sultan Sepuh Syamsuddin, meminta bantuan kepada VOC yang dipimpin oleh Jacob van Dyck dari Batavia. Pangeran Martawijaya meminta bantuan kepada VOC untuk bisa membantunya dalam kekuasaan Kesultanan Cirebon dari tangan saudara-

---

<sup>51</sup> Tertulis dalam kitab Purwaka Caruban Nagari yang ditulis oleh Pangeran Aria dalam bentuk salinan, pada halaman 39-40 dan di sempurnakan dalam tulisan Atja, *op.cit.*, hlm 74.

<sup>52</sup> Pangeran Warsakerta adalah anak selir dari Panembahan Girilaya dan mendapatkan titah sebagai penasehat untuk kedua Kesultanan di Cirebon.

saudaranya. Bahkan Jacob van Dick dijadikan sebagai *Commissaris* di Cirebon jika berhasil membantu Pangeran Martawijaya. Setelah terjadi pertikaian antara saudara ini, VOC memutuskan bahwa pemerintahan tertinggi di Cirebon adalah pihak Belanda. Sehingga kekuasaan dari Kesultanan Cirebon tidak terikat kepada manapun kecuali VOC. Belanda dengan iming-iming berjanji akan melindungi para penguasa Cirebon dengan menjadikan Cirebon sebagai wilayah dalam lindungan Belanda. Sultan Kasepuhan, Kanoman, dan Panembahan Cirebon akhirnya menandatangani perjanjian.<sup>53</sup>

Pada tahun 1680 Belanda menyetujui atas isi dari teks perjanjian yang ditujukan untuk para penguasa Cirebon. Kemudian pada tahun 1681 dari setiap utusan penguasa Cirebon menghadiri adanya upacara kenegaraan berada di rumah Rijckloff van Goens yang dipimpin oleh Jacob van Dyck di Batavia. Pada malam hari setelah pertemuan kenegaraan tersebut Jacob van Dyck beserta Sultan Kasepuhan, Kanoman, dan Panembahan Cirebon kembali ke Cirebon.<sup>54</sup>

Pada tanggal 4 Januari 1681 diadakan upacara yang dihadiri para penguasa Cirebon dan pejabat VOC didalamnya. Upacara ini membacakan keputusan pada tanggal 1 Januari 1681. Pada tanggal 7 Januari 1681 diadakan perundingan antara VOC dan para sultan Cirebon, dari pertemuan ini Sultan-sultan menyetujui apa yang diberlakukan dalam perjanjian antara Cirebon dan Belanda. Pada tanggal 31 Juli 1681 dilakukan tindak lanjut dari adanya perjanjian tanggal 7 Januari 1681,

---

<sup>53</sup> Deviani, F. T. (2016). Perjanjian 7 Januari 1681 Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Sosial Politik Ekonomi Di Kerajaan Cirebon (1681 M-1755 M). *Tamaddun : Jurnal Sejarah Kebudayaan Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon*, 4. Hlm 126.

<sup>54</sup> Tendi, T. (2022). Kontrak Cirebon-VOC Tahun 1699: Peran VOC dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Cirebon. *Socio Historica: Journal of Islamic Social History*, 1(2), 127–151. <https://doi.org/10.15408/sh.v1i2.2759> . Hlm 142.

dengan selanjutnya di tandatangi oleh sultan-sultan Cirebon.<sup>55</sup> Isi dari perjanjian 7 Januari 1681 sebagai berikut:

1. Cirebon sebagai daerah protektorat dari VOC;
2. Sultan dan VOC harus saling menjalin persahabatan;
3. Sultan-sultan di Cirebon tidak melakukan hal yang diluar persetujuan untuk keamanan yang akan dilakukan oleh VOC, baik dalam memperkuat pertahanan ataupun perbatasan tanpa seizin dari kompeni;
4. Kompeni berhak membangun benteng di Cirebon sebagai bentuk pertahanan untuk wilayah Cirebon dari kompeni lainnya.<sup>56</sup>

Semenjak Kesultanan Cirebon terbagi menjadi tiga kekuasaan banyak terjadi konflik. Hal ini membuat keuntungan Belanda untuk terus memperkuat kekuasaanya di Cirebon. Konflik internal keraton menjadi kesempatan VOC untuk melakukan intervensi terhadap Cirebon. VOC dengan janji dan dalih untuk menjaga serta memberikan perlindungan terhadap Cirebon kepada para sultan. VOC mampu mempengaruhi sultan-sultan menandatangani perjanjian persahabatan dan berdagangan di Cirebon.<sup>57</sup>

### **2.3.2 Perpecahan Tahap 2: Perjanjian 4 Desember 1685**

Pada tahun 1680 M terjadi perselisihan di Banten antara Sultan Ageng Tirtayasa dan Sultan Haji, hal seperti ini juga pernah terjadi di Cirebon. Pada saat itu Sultan Haji yang ingin segera naik tahta dari ayahnya dengan melakukan persekutuan dengan VOC. Namun siapa sangka bahwa VOC meminta Cirebon

---

<sup>55</sup> *Ibid.*, hlm 130

<sup>56</sup> Naskah perjanjian Cirebon 7 Januari 1681 tercantum juga pada tulisan Deviani, F. T., (2016). Perjanjian 7 Januari 1681 dan Implikasinya terhadap Kehidupan Sosial Politik, Ekonomi di Kerajaan Cirebon (1681-1755). *Tamaddun : Jurnal Sejarah Kebudayaan Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon*. Hlm. 78

<sup>57</sup> Susanti, *op.cit.*, hlm 176.

sebagai jaminannya. Pada 14 Maret 1683 Sultan Ageng Tirtayasa mengalami kekalahan dan dipenjarakan di Batavia sampai wafatnya di tahun 1692 M.<sup>58</sup>

Sepeninggal Sultan Ageng Tirtayasa para kepala daerah yang awalnya berlindung terhadap dua Kerajaan, yakni Mataram dan Banten mengalami keterpaksaan untuk meminta perlindungan kepada VOC. Para pangeran Cirebon yang sudah mendapatkan daerah kekuasaan atas perintah dari Sultan Ageng Tirtayasa ternyata mendapati keikutsertaan VOC ada di Cirebon. Ketiga pangeran terlibat dalam perjanjian-perjanjian dan kontrak perdagangan yang dilakukan oleh VOC.

Adanya perjanjian kontrak dengan Cirebon, VOC dapat menanamkan segala pengaruhnya di Cirebon dengan mudah. Kesepakatan dan perjanjian ini tentang superioritas politik dari Batavia atas Cirebon dalam kebijakan ekonomi yang ditetapkan oleh Gubernur. Pemerintahan VOC yang memiliki pengaruh secara penuh dalam ekonomi, dan untuk melakukan keamanan yang mengganggu ekonomi Cirebon. Pada tahun 1685 kapten Francois Tack mendarat di Cirebon sebagai perwakilan dan pemerintahan VOC dari Batavia. Tidak lama dari kedatangannya gubernur jenderal VOC menunjuk Francois Tack menjadi penasihat di Mataram dan Cirebon. Francois Tack dipercaya oleh jenderal untuk menyelesaikan persoalan yang masih belum tercapai di Cirebon, yakni pembuatan benteng sebagai pondasi keamanan.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Dwicahyo, S. (2021). Benteng Bescherming di Cirebon: Konteks Politik, Fitur Fisik, dan Fungsinya pada Akhir Abad Ke-17. *Patra Widya: Seri Penerbitan Penelitian Sejarah Dan Budaya.*, 22(1), 81–100. <https://doi.org/10.52829/pw.299> . Hlm 88.

<sup>59</sup> *Ibid.*



Adaynya perjanjian persahabatan yang disahkan pada tanggal 7 Januari 1681, VOC melakukan perjanjian kembali dengan Cirebon pada bidang keamanan. Keamanan yang dilakukan oleh VOC adalah dengan mendirikan benteng untuk perlindungan. Perjanjian ini terjadi pada tanggal 4 Desember 1685. Perjanjian ini dihadiri oleh Sultan Sepuh, Sultan Anom dan Panembahan Cirebon, serta dari pihak VOC yakni Francois Tack mewakili Gubernur jendral VOC. Perjanjian ini langsung disahkan dan segera mungkin untuk membangun benteng perlindungan untuk Cirebon. Perjanjian ini dinamakan Surat Janji dan Mufakat 4 Desember 1685. Pada perjanjian ini tidak hanya membahas terkait keamanan saja, namun juga untuk menyelesaikan konflik antara Sultan Sepuh I dengan Sultan Anom I. Sehingga Francois Tack harus meluruskan kembali dari kedua belah pihak yang berkonflik.<sup>60</sup>

Ada beberapa garis besar dari perjanjian ini yang membuat para sultan langsung menyetujui yakni :<sup>61</sup>

1. Dalam perjanjian ini disebutkan bahwa adanya persatuan dan kesatuan antar penguasa Cirebon dalam kehidupan pemerintahan yang dilakukan tanpa konflik,
2. Disebutkan pula bahwa, diharapkan para sultan untuk bisa saling menghormati baik antar sultan maupun kepada VOC. Hal ini yang memiliki tujuan pada adat dan istiadat Cirebon,<sup>62</sup>
3. Penguasa Cirebon hanya bisa mengelola satu syahbandar saja yang sudah ditentukan oleh VOC,
4. Pengelolaan hasil dari negara hanya dengan bantuan dari Syahbandar Cina demi kedamaian bersama
5. Kemudian menyetujui adanya pembangunan benteng sebagai perlindungan Cirebon dari gangguan bangsa Eropa lain yang ingin menguasai Cirebon

---

<sup>60</sup>*Ibid.* 90.

<sup>61</sup>Naskah perjanjian 4 Desember 1685 yang dicatat dalam Arsip Belanda pada 4 Agustus 1699 tercantum juga pada tulisan Tendi, T., *op.cit.*, hlm. 94-95.

<sup>62</sup> Nurhata (2023). *Alih Aksara Cerbon : Kitab Undang-undang Kesultanan Cirebon*. Perpusnas Press. Jakarta. Hlm. 13-14.

Selanjutnya melakukan Tack membuat sketsa gambar sebagai patokan agar pembangunan bisa sesuai dengan yang diinginkan para sultan. Tahap selanjutnya dilakukan survey tempat benteng bambu yang dimiliki Cirebon. Terakhir adanya perobohan dari benteng yang pernah dibuat dari bambu beserta fasilitas didalamnya. Tack meminta bantuan dari Batavia terkait dana untuk pendirian benteng tersebut. Namun, pihak Batavia hanya mampu mengirimkan setengah dana kepada Tack. Sehingga Tack menggunakan dana pajak dari hasil bumi rakyat untuk pembuatan benteng yang berdasarkan batu. Namun ternyata benteng bambu yang dirobohkan oleh Tack adalah benteng bambu yang dibuat oleh Pangeran Trenggono dari Demak untuk menjaga Cirebon dari gangguan-gangguan spiritual.

Tidak lama dari perobohan benteng bambu tersebut benteng yang sudah memiliki sketsa dan diberinama Benteng Bescherming tidak terlelisasikan. Hal ini dikarenakan Francois Tack meninggal dunia saat perjalanan dari Cirebon menuju mataram dalam pertempuran Laskar Untung Surapati di Surakarta pada tahun 1686. Pada 8 Maret 1685 pemerintahan VOC Batavia melakukan pembangunan benteng tersebut namun tidak sesuai dengan sketsa yang telah dibuat oleh Tack. Benteng Bescherming dibangun dengan aterial yang permanen dan fungsinya tetap untuk perdagangan di laut Cirebon. Sepeninggal Francois Tack pemerintah VOC Batavia hanya mempercayai laporan tentang keadaan Cirebon hanya kepada Johannes Hartogh.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> Dwicahyo, S., *op.cit.*, hlm. 92-93

### 2.3.3 Dampak Kebijakan VOC Terhadap Cirebon

VOC benar-benar melakukan kekuasaan politiknya di Cirebon dengan melakukan perjanjian-perjanjian yang merugikan kesultanan dan rakyat. Segala bentuk pemerintahan, perdagangan, dan pertahanan dilakukan harus atas seizin dari Kompeni VOC. Sultan disini sudah kehilangan kekuasaannya sebagai pemimpin dalam bidang politik. Dalam perjanjian terakhir pada 4 Desember 1685 oleh VOC dan Sultan Cirebon menyatakan bahwa “Titel Sultan Panembahan sudah tidak digunakan lagi dalam surat dan naskah kompeni”.<sup>64</sup>

VOC melakukan perdagangan dengan bantuan rakyat pribumi, namun rakyat sangat dibatasi dalam melakukan surat izin perdagangan yang disahkan oleh VOC. Pihak VOC menguasai pusat komoditi perdagangan sehingga membuat kemunduran aktivitas dalam perdagangan yang dilakukan oleh rakyat Cirebon. Misalnya dalam melakukan perdagangan kepada VOC harga dari padi hanya kisaran 25 Ringgit per 4.500 kg. Pematokan harga tersebut sangatlah jauh dari pemasaran internasional sebelum jalur perdagangan ini di kuasai oleh VOC.<sup>65</sup> Berikut adalah kebijakan dan dampak perdagangan yang dilakukan VOC.

#### a. Kebijakan VOC

Keseluruhan kebijakan yang dilakukan oleh VOC terhadap perdagangan Cirebon antara lain melakukan pemisahan antara kekuasaan kesultanan dengan VOC yang membuat para sultan harus selalu melakukan pelaopan perihal perdagangan dari rakyat kepada VOC. Selanjutnya melakukan pemberitahuan bahwa kekuasaan semua berpusat kepada VOC, sehingga pihak keraton harus

---

<sup>64</sup>Tim Peneliti Jurusan Sejarah Fakultas Sastra UNPAD, *Sejarah Cirebon Abad Tujuh Belas*. Bandung:Pemda.TK I, 1991. Hlm. 252.

<sup>65</sup>Johari, *op.cit.*, hlm 61.

selalu meminta izin atas semua keputusan kepada pihak VOC. VOC melakukan pergantian tahta atas seizin dan sepengetahuan VOC kepada semua keraton di Cirebon. Pemerintahan VOC melakukan pergantian khusus dari gelar sultan dan pangeran di Cirebon, sebagai contoh gelar panembahan sudah tidak dipakai dan gelar pangeran mahkota menjadi Pangeran Adipati Raja. VOC memutuskan sultan hanya sebagai abdi negara di negaranya sendiri dan dalam pengawasan serta VOC berhak untuk melakukan perubahan di Kesultanan.

VOC tidak hanya melakukan segala kebijakannya kepada Keraton-keraton di Cirebon saja, namun juga kepada masyarakat Cirebon seperti, melakukan monopoli dagang dengan upah atau bayaran yang tidak sesuai dengan perdagangan internasional lain. Rakyat Cirebon harus mematuhi VOC dan sultan hanya sebagai perantara saja. Rakyat Cirebon mengelola tanahnya yang sudah di sewakan kepada pihak swasta dan pembagian sistem penyewaan yang tidak merata. Hasil bumi yang didapat oleh rakyat tidak boleh diserahkan kepada pihak pedagan asing kecuali kepada pihak yang telah disetujui VOC. rakyat harus menyetujui dilakukannya penyewaan tanahnya oleh VOC.<sup>66</sup>

#### b. Dampak Kebijakan VOC

Kondisi sosial, politik dan ekonomi Cirebon dibawah kekuasaan VOC semakin memudar akan eksistensinya. Dampak dari situasi dan kondisi Cirebon atas kekuasaan VOC, sebagai berikut:

1. Terjadinya wabah penyakit, kemiskinan dan kelaparan di Cirebon. Hal ini terjadi pada tahun 1719, 1721, 1756, 1757, 1773, 1775, 1776, 1792, dan

---

<sup>66</sup>*Ibid.*, hlm. 77-80.

1812. Pada tahun 1756 mendapat laporan bahwa rakyat menjadi miskin serta semua harta kekayaan mereka dirampas oleh VOC, dan terjadi bencana alam. Tahun 1773 dan 1775 awal terjadinya penyakit pes (penyakit bakteri yersinia pesitis) yang menular.<sup>67</sup>

2. Menurunnya kekuasaan dari Sultan. Sejak disahkan perjanjian 7 Januari 1681, kekuasaan dari Sultan tidak lagi menjadi dominan dalam kehidupan sosial, ekonomi maupun politik di Cirebon. Keraton-keraton di Cirebon hidup dengan berbagai aturan yang diikat oleh VOC.<sup>68</sup>
3. Kekecewaan rakyat terhadap pengangkatan putra mahkota. Adanya keputusan dari Sultan Kanoman yang mengangkat putra yang tidak sah dari hak waris menduduki tahta Kesultanan Kanoman. Sedangkan di Kesultanan Kasepuhan adanya pengangkatan Sultan Muda yang dilakukan oleh VOC, setelah gugurnya Sultan Sepuh V.<sup>69</sup>

Adapun dampak lain saat Cirebon mulai memasuki abad ke 19-20 dikenal sebagai kota yang minim akan kebersihannya dan paling banyak kejadian kekerasan terhadap perempuan. Keadaan Cirebon yang belum teratur, kotor, becek, tidak memilikinya saluran pembuangan kotoran rumah tangga ini disebabkan kekuasaan VOC dahulu. Akibatnya jika terjadi hujan besar, Cirebon mengalami banjir. Ini juga terjadi karena adanya kelancaran air sungai yang masih sangat disesuaikan kepada pasang surutnya air laut. Sehingga mengakibatkan terjadinya wabah penyakit yang melanda Cirebon. Pada masa Pemerintahan

---

<sup>67</sup> Sumber wawancara dari Bapak Mustaqim Asteja yang diperkuat oleh buku, Julia Maria van Tiel & Jan van Tiel. *The Rainbow of Cirebon : Cultural, Heritage and The History of Cirebon, West Java – Indonesia*. Yayasan Prima Ardiantama.

<sup>68</sup> Susanti, L., *op.cit.*, hlm. 284.

<sup>69</sup> *Ibid.* hlm. 286.

Hindia-Belanda yang dipimpin oleh Daendels melakukan reorganisasi untuk bisa memulihkan Cirebon yang dahulunya mendapatkan dari kesewenangan VOC. Mulai dari sini kekuasaan VOC di Cirebon berakhir dan hadirnya masa Hindia Belanda di Cirebon dengan kepemimpinan berganti menjadi Keresidenenan. Keresidenen Cirebon terbagi kedalam beberapa residen yakni Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kuningan, Indramayu dan Majalengka.<sup>70</sup>

Berdasarkan teori *Challenge and Response* menurut Arnold J. Toynbee maka tantangan rakyat Cirebon yakni mendapatkan perlakuan secara kekerasan, paksaan serta mendapatkan kebijakan yang sangat merugikan. Hal ini membuat pihak yang dirugikan melakukan perlawanan terhadap apa yang terjadi. Sultan yang dalam konteks hubungan menjadi patra (pelindung), berupaya untuk melawan agar rakyatnya (klien) bisa hidup tenang. Kehadiran Sultan Sepuh V sebagai patra atau pelindung menjadi respon terhadap intimidasi VOC.

---

<sup>70</sup> *Ibid.*, hlm 281.